



KLASIFIKASI, TATAKELOLA DAN SIMULASI PEMBENTUKAN UKPBJ

Direktorat Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otonomi Daerah

DASAR HUKUM PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2018

**PERMENDAGRI
NOMOR 112 TAHUN 2018**



Pasal 75 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **mengamanatkan** dibentuknya UKPBJ Pemerintah yang melaksanakan fungsi pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelayanan administratif dan pembinaan ASN di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

BAHWA PERMENDAGRI NO. 99 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PEMBENTUKAN ULP BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGK. PROV/KAB/KOTA SUDAH TIDAK SESUAI DENGAN DINAMIKA PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KLASIFIKASI DAN BENTUK KELEMBAGAAN UKPBJ

Pasal 5 s.d. Pasal 7

KLASIFIKASI UKPBJ

Kelas A apabila total skor variabel > 800

Kelas B apabila total skor variabel ≤ 800

Dapat diturunkan pewadahan dari Kelas A menjadi Kelas B.

KELEMBAGAAN UKPBJ

UKPBJ Provinsi

Biro : mewadahi Kelas A

Bagian : mewadahi Kelas B

UKPBJ Kab/Kota

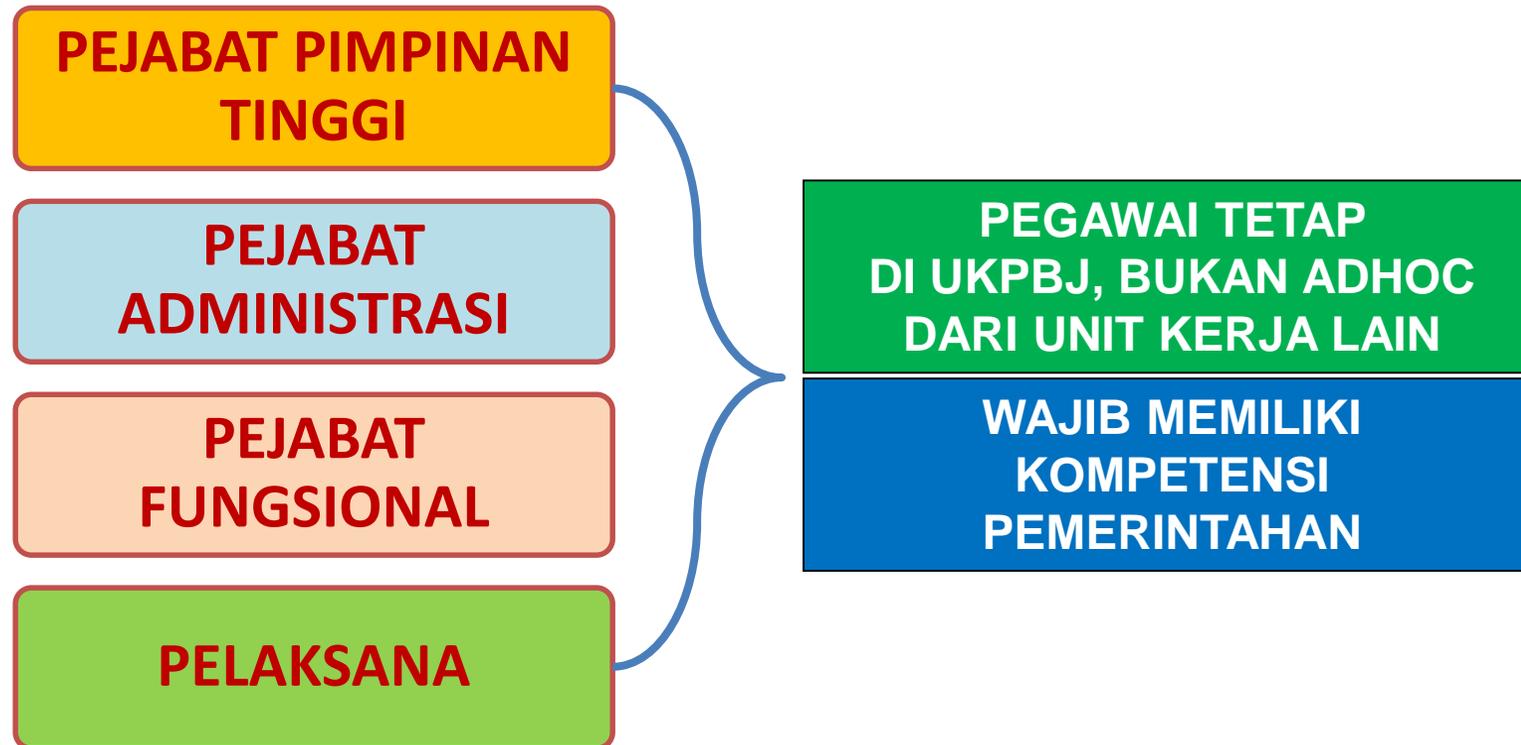
Bagian : mewadahi Kelas A

Subbagian : mewadahi Kelas B

KEPEGAWAIAN UKPBJ

PROVINSI, KAB./KOTA

Pasal 11



PEJABAT FUNGSIONAL UKPBJ

Pasal 12

PEJABAT FUNGSIONAL

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

2 Fungsi

PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

PENYUSUNAN PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL/SEKTORAL

dibentuk

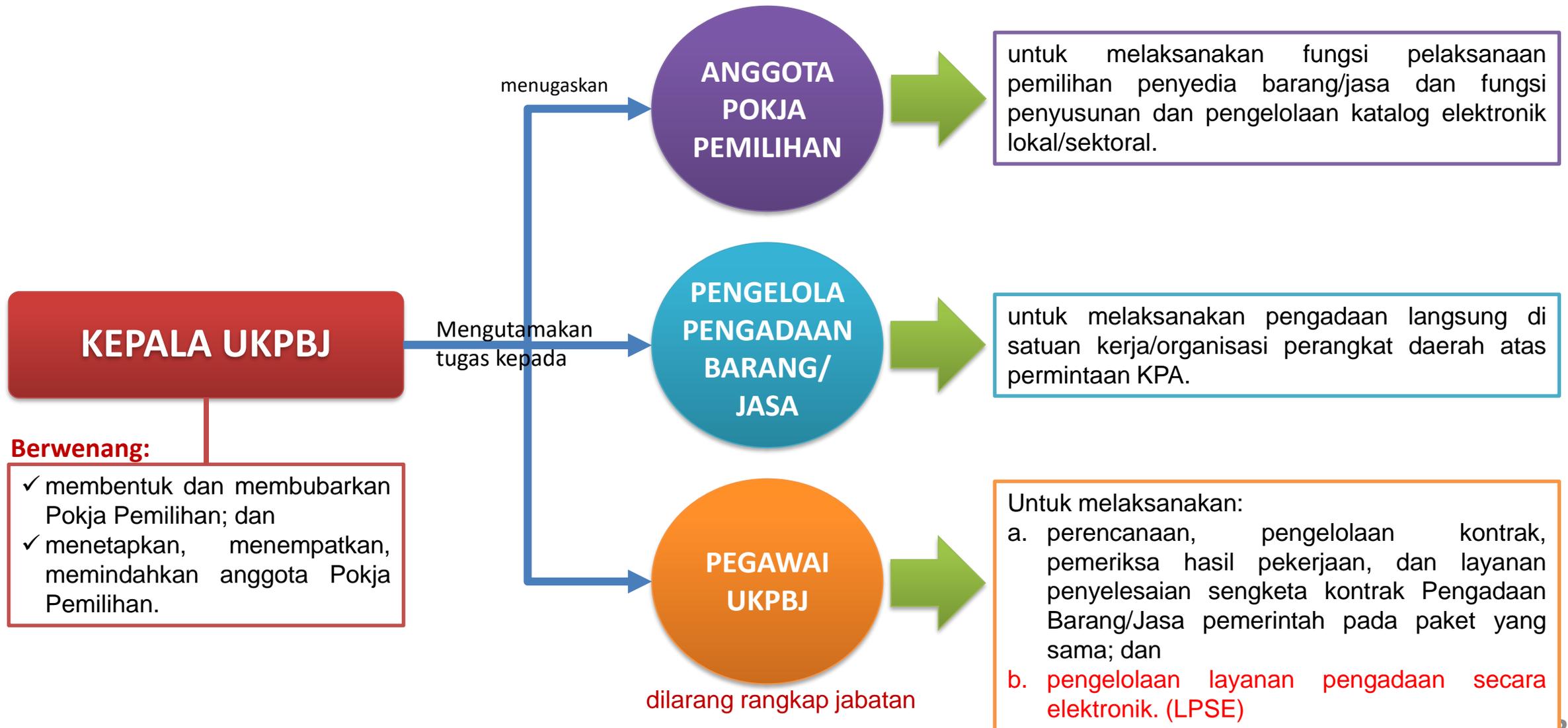
POKJA PEMILIHAN

Jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Jumlah Pokja Pemilihan ditentukan berdasarkan **kebutuhan dan beban kerja**.

Anggota Pokja Pemilihan **berjumlah gasal**, paling sedikit 3 orang

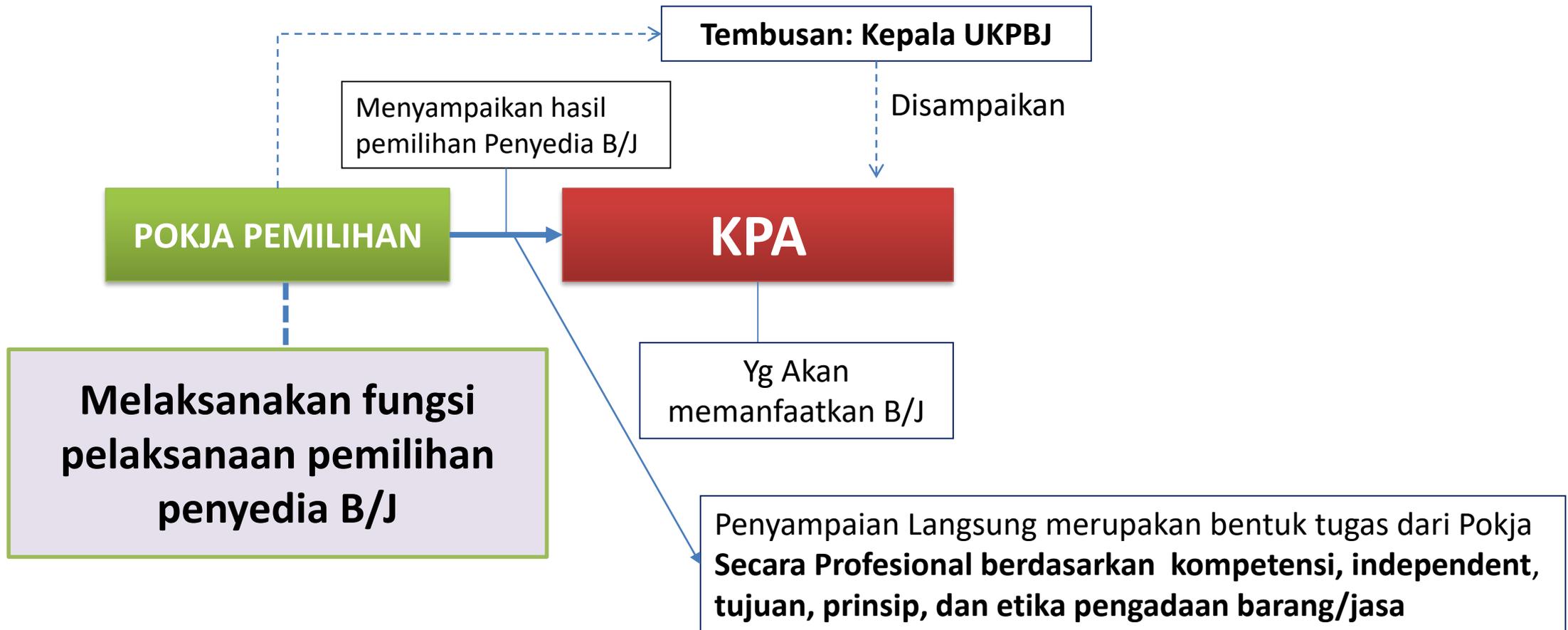
FUNGSI KEPALA UKPBJ

Pasal 13 s.d. Pasal 15



TATA KERJA PBJ OLEH UKPBJ

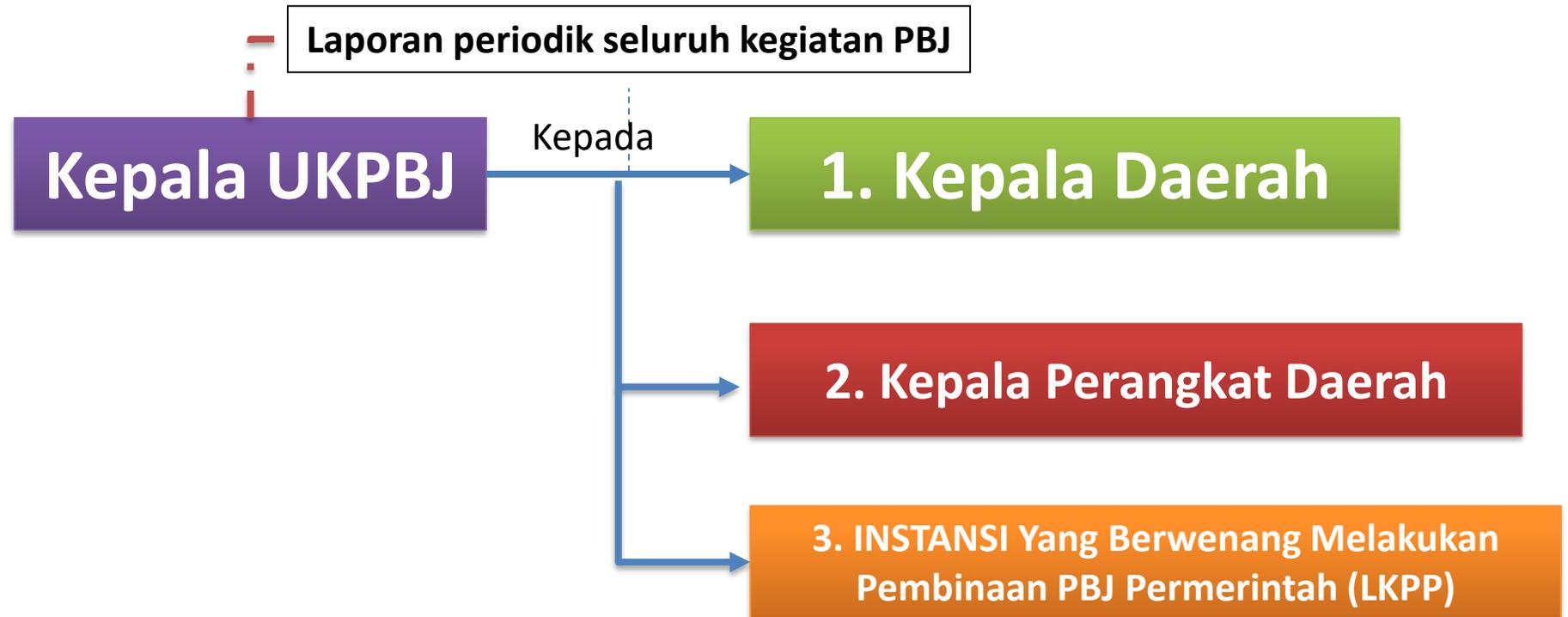
Pasal 16



PEGAWAI UKPBJ YG BERTUGAS UNTUK BINTEK, PENDAMPINGAN, DAN/ATAU KONSULTASI PENYUSUNAN RENCANA PERSIAPAN PENGADAAN DAN/ATAU PENGELOLAAN KONTRAK DILARANG MELAKSANAKAN LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK MELALUI MEDIASI PAKET YANG SAMA

PELAPORAN OLEH UKPBJ PROV/KAB/KOTA

Pasal 17



MUATAN LAPORAN BERISI SELURUH KEGIATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA OLEH UKPBJ



KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMBENTUKAN KODE ETIK

Pasal 18

Berisi ketentuan tentang:

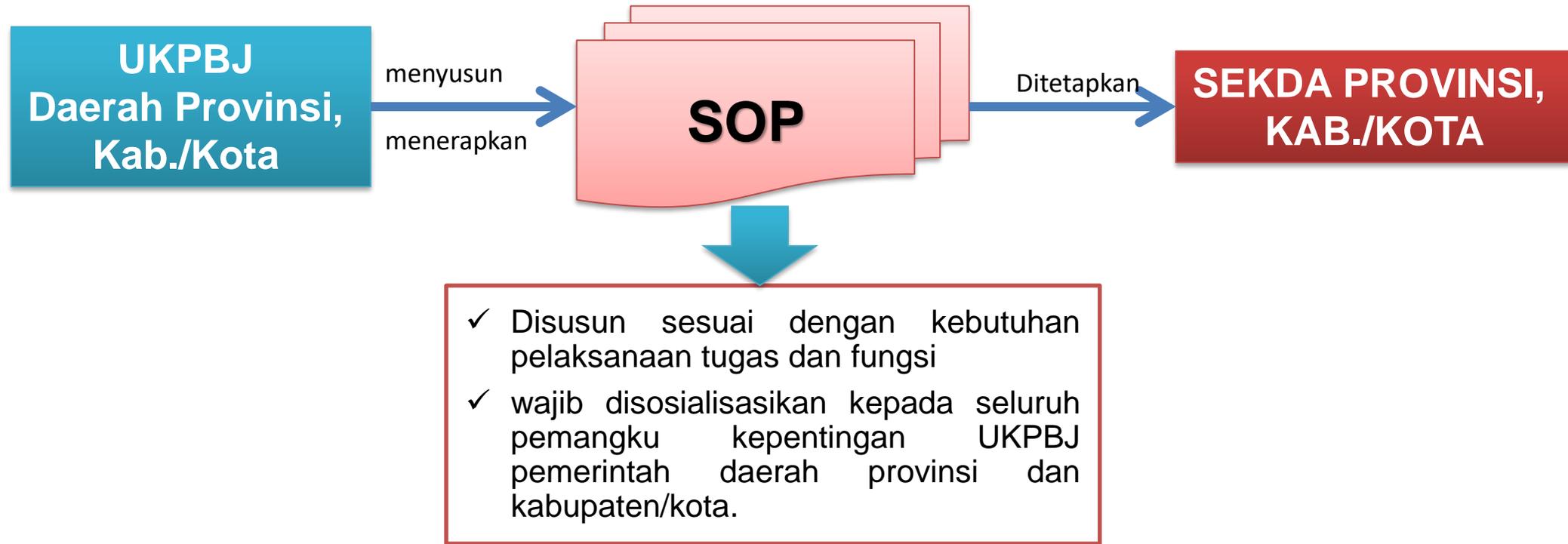
1. Kewajiban
2. Larangan
3. Pembentukan majelis pertimbangan kode etik
4. Prosedur penegakan kode etik



PEMBENTUKAN SOP

Pasal 19

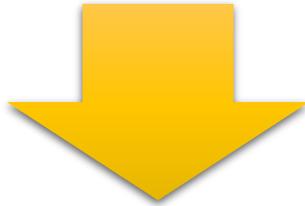
TUJUAN SOP : UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN MENGURANGI TERJADINYA INTERVENSI PELAKSANAAN TUGAS



KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pengaturan Unit Layanan Pengadaan dan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
menjadi UKPBJ



**dilakukan paling lama akhir bulan
Desember Tahun 2018**

INDIKATOR PEMBENTUKAN UKPBJ PROVINSI

- 1 Rata-rata jumlah total nilai paket pengadaan Barang/Jasa dalam 3 tahun terakhir (Rp)
- 2 Rata-rata jumlah paket pekerjaan Kontruksi dalam 3 tahun terakhir (paket)
- 3 Rata-rata jumlah paket pengadaan barang dalam 3 tahun terakhir (paket)
- 4 Rata-rata jumlah paket jasa konsultasi (tenaga ahli) dalam 3 tahun terakhir (paket)
- 5 Rata-rata jumlah paket jasa lainnya dalam 3 tahun terakhir (paket)
- 6 Jumlah pemegang sertifikat ahli PBJB
- 7 Jumlah organisasi perangkat daerah
- 8 Jumlah penyedia yang terdaftar di layanan pengadaan secara elektronik

INDIKATOR PEMBENTUKAN UKPBJ PROVINSI

No.	Indikator & Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	Rata-rata jumlah total nilai paket Pengadaan Barang/Jasa dalam 3 (tiga) tahun terakhir (Rp)			
	≤ 1 miliar	200	20	40
	> 1 – 2 miliar	400		80
	> 2 – 3 miliar	600		120
	> 3 – 4 miliar	800		160
	> 4 miliar	1000		200
2	Rata-rata jumlah paket pekerjaan konstruksi dalam 3 (tiga) tahun terakhir (paket)			
	≤ 200	200	15	30
	> 200 – 300	400		60
	> 300 – 400	600		90
	> 400 – 500	800		120
	> 500	1000		150

No.	Indikator & Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
3	Rata-rata jumlah paket pengadaan barang dalam 3 (tiga) tahun terakhir (paket)			
	≤ 800	200	15	30
	> 800 – 1000	400		60
	> 1000 – 1200	600		90
	> 1200 – 1400	800		120
	> 1400	1000		150
4	Rata-rata jumlah paket jasa konsultansi dalam 3 (tiga) tahun terakhir (paket)			
	≤ 100	200	15	30
	> 100 – 200	400		60
	> 200 – 300	600		90
	> 300 – 400	800		120
	> 400	1000		150

No.	Indikator & Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
5	Rata-rata jumlah paket jasa lainnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir (paket)			
	≤ 300	200	15	30
	> 300 – 400	400		60
	> 400 – 500	600		90
	> 500 – 600	800		120
	> 600	1000		150
6	Jumlah Pemegang Sertifikat Ahli PBJP			
	≤ 200	200	5	10
	> 200 – 400	400		20
	> 400 – 600	600		30
	> 600 – 800	800		40
	> 800	1000		50

No.	Indikator & Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
7	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah			

No.	Indikator & Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
	≤ 20	200	10	20
	$> 20 - 25$	400		40
	$> 25 - 30$	600		60
	$> 30 - 35$	800		80
	> 35	1000		100
8	Jumlah penyedia yang terdaftar di layanan pengadaan secara elektronik		5	
	≤ 100	200		10
	$> 100 - 200$	400		20
	$> 200 - 300$	600		30
	$> 300 - 400$	800		40
	> 400	1000		50
Total Skor Faktor Teknis			100	1000

CONTOH SIMULASI PERHITUNGAN PEMBENTUKAN UKPBJ PROVINSI

No.	Indikator	NILAI	SKALA Nilai	SKOR
1.	Rata-rata jumlah total nilai paket pengadaan Barang/Jasa dalam 3 tahun terakhir (Rp)	1,75 Milyar	400	80
2.	Rata-rata jumlah paket pekerjaan Kontruksi dalam 3 tahun terakhir (paket)	369	600	90
3.	Rata-rata jumlah paket pengadaan barang dalam 3 tahun terakhir (paket)	1.156	600	90
4.	Rata-rata jumlah paket jasa konsultasi (tenaga ahli) dalam 3 tahun terakhir (paket)	342	800	120
5.	Rata-rata jumlah paket jasa lainnya dalam 3 tahun terakhir (paket)	571	800	120
6.	Jumlah pemegang sertifikat ahli PBJB	231	400	20
7.	Jumlah organisasi perangkat daerah	34	800	80
8.	Jumlah penyedia yang terdaftar di layanan pengadaan secara elektronik	286	600	30
JUMLAH NILAI				630

SKOR : 630 (KELAS B)

CATATAN

1. Bagi Daerah yang telah membentuk Lembaga UKPBJ, agar **menyesuaikan** dengan Permendagri 112/2018. Lembaga yang sudah ada apabila ternyata lebih kecil dari hasil skoring yang dihasilkan agar tetap dipertahankan (efiseinsi);
2. Data Skoring untuk menentukan kelas UKPBJ Daerah Provinsi ditandatangani **oleh Sekda Provinsi dan Disetujui oleh Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otda Kemendagri**, Untuk UKPBJ Kabupaen/Kota ditandatangani oleh **Sekda Kabupaten/Kota**, dan disetujui oleh **Kepala Biro Organisasi Provinsi**;
3. Data Paket dan Nilai Lelang termasuk Paket **Pengadaan Langsung, Penunjukan langsung, Swakelola, dan E-Katalog**.
4. Tahun Data Untuk Penghitungan Skoring (Kelas UKPBJ) adalah 3 Tahun terakhir, yaitu **Tahun 2016, 2017, dan 2018**.

INDIKATOR PEMBENTUKAN UKPBJ KAB/KOTA

- 1 Rata-rata jumlah total nilai paket pengadaan Barang/Jasa dalam 3 tahun terakhir (Rp)
- 2 Rata-rata jumlah paket pekerjaan Kontruksi dalam 3 tahun terakhir (paket)
- 3 Rata-rata jumlah paket pengadaan barang dalam 3 tahun terakhir (paket)
- 4 Rata-rata jumlah paket jasa kosultasi (tenaga ahli) dalam 3 tahun terakhir (paket)
- 5 Rata-rata jumlah paket jasa lainnya dalam 3 tahun terakhir (paket)
- 6 Jumlah pemegang sertifikat ahli PBJB
- 7 Jumlah organisasi perangkat daerah
- 8 Jumlah Kelurahan/Desa
- 9 Jumlah penyedia yang terdaftar di layanan pengadaan secara elektronik

INDIKATOR PEMBENTUKAN UKPBJ KABUPATEN/KOTA

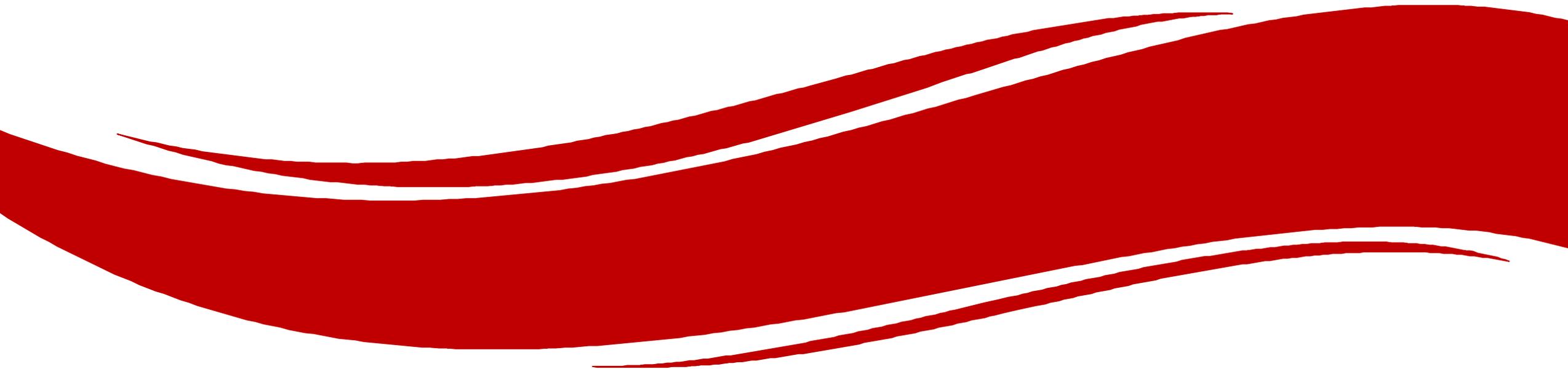
No.	Indikator & Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	Rata-rata jumlah total nilai paket pengadaan barang/jasa dalam 3 (tiga) tahun terakhir (Rp)			
	≤ 550 juta	200	20	40
	> 550 – 700 juta	400		80
	> 700 – 850 juta	600		120
	> 850 – 1 miliar	800		160
	> 1 miliar	1000		200
2	Rata-rata jumlah paket pekerjaan konstruksi dalam 3 (tiga) tahun terakhir (paket)			
	≤ 50	200	15	30
	> 50 – 150	400		60
	> 150 – 250	600		90
	> 250 – 350	800		120
	> 350	1000		150

No.	Indikator & Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
3	Rata-rata jumlah paket pengadaan barang dalam 3 (tiga) tahun terakhir (paket)			
	≤ 400	200	15	30
	> 400 – 600	400		60
	> 600 – 800	600		90
	> 800 – 1000	800		120
	> 1000	1000		150
4	Rata-rata jumlah paket jasa konsultansi dalam 3 (tiga) tahun terakhir (paket)			
	≤ 100	200	15	30
	> 100 – 150	400		60
	> 150 – 200	600		90
	> 200 – 250	800		120
> 250	1000	150		

No.	Indikator & Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
5	Rata-rata jumlah paket jasa lainnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir (paket)			
	≤ 150	200	15	30
	> 150 – 200	400		60
	> 200 – 250	600		90
	> 250 – 300	800		120
	> 300	1000		150
6	Jumlah Pemegang Sertifikat Ahli PBJP			
	≤ 50	200	5	10
	> 50 – 100	400		20
	> 100 – 150	600		30
	> 150 – 200	800		40
	> 200	1000		50

No.	Indikator & Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
7	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah			
	≤ 15	200	5	10
	> 15 – 20	400		20
	> 20 – 25	600		30
	> 25 – 30	800		40
	> 30	1000		50
8	Jumlah Kelurahan/Desa			
	≤ 15	200	5	10
	> 15 – 20	400		20
	> 20 – 25	600		30
	> 25 – 30	800		40
	> 30	1000		50

No.	Indikator & Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
9	Jumlah penyedia yang terdaftar di layanan pengadaan secara elektronik			
	≤ 50	200	5	10
	> 50 – 100	400		20
	> 150 – 200	600		30
	> 200 – 250	800		40
	> 250	1000		50



Terima Kasih

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

